

# **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia tahun 2012-2014)**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**ANDRI SILAEN**

**NIM. 12030112130044**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2016**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Andri Silaen

Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130044

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi  
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang  
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014)**

Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt

Semarang, 23 Februari 2016

Dosen Pembimbing,

(Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt)

NIP. 196101091988031001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Andri Silaen

Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130044

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi  
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang  
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal Maret 2016**

Tim Penguji:

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt (.....)
2. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si, Akt (.....)
3. Dr. Warsito Kawedar, S.E., M.Si, Akt (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Andri Silaen, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau ivegati yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar sarjana dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,

Andri Silaen

NIM: 12030112130044

## **ABSTRACT**

*This study aimed to examine effect of corporate governance to tax avoidance. The dependent variable is tax avoidance which is proxied by GAAP ETR. Independent variables are corporate governance which proxied by institutional ownership, proporsion of independent commissioner, size and financial expertise background of audit committee. There are control variables on this study, which proxied by size, leverage, and ROA.*

*This study used secondary data from annual report of manufacturing companies which listed on Indonesia Stock Exchange 2012-2014. There were 165 total observations of manufacturing companies. This study used purposive sampling method and multiple regression analysis to test the hypotheses. Statistic program in this study used SPSS 16.*

*The result of this study showed that none of hypotheses were accepted. Institutional ownership did not has effect because the higher institutional ownership level in company, the higher tax avoidance activity on company. This is happened because they became the person who dominate the decision of company tax policy. Proportion of independent commissioners and audit committee size did not have effect because this parties alleged only obey the rules from government. Financial expertise background of audit committee did not have effect because apart of financial expertise, additional expertise in taxation is important to monitor the tax avoidance. External auditor did not have effect because this party only have rule to make sure the credibility of financial reporting, not to decrease the tax avoidance activity.*

*Keywords: tax avoidance, GAAP ETR, corporate governance.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *GAAP ETR* dan variabel independennya adalah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dan latar belakang keuangan komite audit, serta ukuran KAP. Terdapat tiga variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu *Size*, *Leverage*, dan *ROA*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Total observasi berjumlah 165 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS 16. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari lima hipotesis yang diajukan tidak ada satu pun hipotesis yang diterima. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak disebabkan semakin tinggi presentase kepemilikan institusional dalam perusahaan justru meningkatkan penghindaran pajak dimana mereka menjadi dominan dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh karena diduga keberadaan kedua pihak ini hanya sebatas menaati peraturan yang ada. Latar belakang keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh disebabkan perlunya keahlian tambahan di bidang perpajakan, untuk mengawasi penghindaran pajak. Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh disebabkan peran auditor eksternal hanya sebatas menjamin kredibilitas pelaporan keuangan, bukan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, *GAAP ETR*, tata kelola perusahaan.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang” (Amsal 23:18)**

**“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir” (Pengkotbah 3:11)**

**“Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas” (Ayub 23:10)**

**Start Where You Are.**

**Use What you have.**

**Do What you can.**

**(Arthur Asle)**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk  
Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat  
Dan  
Bapak, Mamak, dan kakakku Sarah yang selalu senantiasa  
memberikan dukungan doa, moral, dan materi  
yang tiada henti-hentinya.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaanNya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul: “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2012-2014) dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Fuad, S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Dr. P. Th. Basuki Hadiprajitno, MBA, MSAcc, Akt, CA. selaku dosen wali juga dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Para dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama proses studi.



6. Orangtuaku tercinta, Drs. Bangsomen Silaen, dan Maria Fransiska Koni Dwi Astuti, untuk setiap kasih sayang dan doa yang dipanjatkan kepada penulis, pengorbanan dan dukungan baik moral dan material yang diberikan kepada penulis.
7. Kakakku Sarah Silaen yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Harrys Silaen dan keluarga, yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
9. Saudara-saudara komcil, tempat bertumbuh dan berbagi selama menuntut ilmu di Semarang: Johannes Simatupang, Juhnianto Tandipasau, Nathanael Nadeak.
10. Adik-adik komcilku yang begitu luar biasa: Nabot Hutabarat, Kyendi Suramana, Advento Johanes, dan Jospor. Tetaplah bertumbuh bersama di dalam segala keadaan adik-adik.
11. Bang Paguh Raja Johnpray, terima kasih untuk setiap nasihat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
12. Woohoo People PMK FEB UNDIP 2014: Bang Sam, Kak Mindo, Bang Yehezkiel, Kak Axel, Ibanku Siska, Kak Tri Puji Kristia, Jonathan, Stephanie, Josep Alfredo, Kak Claudia, Brayen, Kak Elliana, Elika, Bang Paguh, Anthonius, Yuni Ira, Ribka Susilawati, Simson, Kak Mariati, Melia, Claudia Sinaga, Triando, Kak Liese, Yunika, Retno dan Nathanael. Terima Kasih untuk 1 tahun yang begitu luar biasa.

13. *Servant's People* PMK FEB UNDIP 2015: BPH Gendut (Simson, Odi, Jete, Dwy), Janette, Juhnianto, Brigitta Vina Felinda, Inry, Juan, Hendrik, Octrine, Dita Limbong, Riris, Samson, Rico, Frisca Aulia, Citra dan Eveline. Terkhusus untuk Divisi II: Roniasi Situmorang, Rani Gurning, Rendi Octorio, Sri Sinurat, Irviona, Josep Alfredo, Margareth Sihombing, Helinsa Kaban, Erika Siahaan, Jesica Sitepu, Yunika Dewi Lestari, Marito Ninra Gultom, Yusephine Herdiana dan Yohanes Lorens. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang luar biasa bagi penulis.
14. *Tukang Gas* (FUNREG 2016): Josep Alfredo, Roniasi Situmorang, Brigitta Vina Felinda, Yunika Dewi Lestari, Simson Hutagalung, Dita Limbong, Frisca Aulia, Janette Marpaung, Juhnianto Tandipasau, Claudia Sinaga dan Dwy Azarya. Terima kasih untuk keceriaan dan kebersamaan kita selama ini. Tuhan memberkati langkah kita selanjutnya AMIN.
15. Teman bimbingan skripsi: Roniasi, Mangetar, Izza, Ivani, Mega, Janette, Desita, Mufidah, Yogy, Frans, Ruvitsan, Brayen, Samuel, Novia, Fahmi, Taufiq, Stefanus.
16. Teman KKN Tim II Universitas Diponegoro Semarang, Desa Mranggen Tengah, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung: Aziza, Rivia, Tania, Rastia, Devian, dan Yudhis.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 23 Februari 2016

Andri Silaen

## DAFTAR ISI

Halaman

### BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	10
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.Sistematika Penulisan.....	12

### BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Agensi.....	14
2.2. Penghindaran Pajak.....	16
2.2.1. Pengukuran penghindaran pajak.....	20
2.3. Tata Kelola Perusahaan.....	21
2.3.1. Kepemilikan Institusional.....	23
2.3.2. Proporsi Dewan Komisaris Independen.....	24
2.3.3. Komite Audit.....	25
2.3.3.1. Jumlah Komite Audit.....	26
2.3.3.2. Latar Belakang Keahlian Keuangan Komite Audit.....	27
2.3.4. Auditor Eksternal.....	28
2.4. Penelitian Terdahulu.....	31
2.5. Kerangka Pemikiran.....	34
2.6. Pengembangan Hipotesis.....	34

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	41
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	46
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	47

3.4. Metode Pengumpulan Data.....	48
3.5. Metode Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b>	
4.1. Deskripsi Variabel.....	54
4.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.1.1. Uji Normalitas.....	59
4.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.2.1.3. Uji Multikolinearitas.....	62
4.2.1.4 Uji Autokorelasi.....	63
4.3. Analisis Regresi.....	64
4.3.1. Koefisien Determinasi.....	65
4.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	66
4.3.3. Pengujian Hipotesis.....	67
4.4. Pembahasan.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Keterbatasan.....	81
5.3. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 4.1. Perincian Sampel penelitian.....	54
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.3. Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.4. Pengujian Multikolinearitas.....	63
Tabel 4.5. Pengujian Autokorelasi Durbin-Watson.....	64
Tabel 4.6. Rekapitulasi hasil Regresi.....	65
Tabel 4.7. Koefisien Determinasi.....	66
Tabel 4.8. Uji F.....	67
Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis.....	71

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1. Grafik Normal P-Plot.....	61
Gambar 4.2. Grafik Scatterplot.....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	88
Lampiran B Hasil Analisis Regresi.....	92



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah**

Pungutan yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku dikenal sebagai istilah pajak. Dimana hasilnya akan disalurkan kembali untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan mendanai kegiatan pembangunan nasional. Pendapatan terbesar negara di tahun 2015 berasal dari sektor pajak, yaitu sebesar 1,380 triliun rupiah. Jumlah ini mencakup sekitar 77 persen dari total penerimaan negara yang berjumlah 1.793,6 triliun rupiah (*Budget in Brief APBN, 2015*). Nilai ini menunjukkan bahwa pembiayaan negara kita hampir sepenuhnya didukung oleh sektor pajak. Pungutan pajak dioptimalisasi oleh pemerintah mengingat besarnya penerimaan negara dari sektor pajak, yaitu dengan melakukan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi.

Salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak kepada negara adalah perusahaan. Apabila keuntungan yang dihasilkan perusahaan berjumlah besar dalam kegiatan operasionalnya, maka pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara juga akan besar jumlahnya. Namun, perusahaan melihat penyeteroran pajak ini sebagai beban karena dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan (Agusti, 2014). Karena adanya anggapan pajak sebagai

beban oleh perusahaan, maka timbul keinginan agar beban pajak dikurangi sama halnya seperti mengurangi beban-beban yang lain (Mangoting, 1999).

Penghindaran pajak tidak memiliki definisi yang pasti dan jelas, namun secara universal penghindaran pajak didefinisikan sebagai aktivitas untuk mengurangi pajak secara tersembunyi dan berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan pajak perusahaan. (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen pajak, dimana tindakan ini merupakan usaha yang secara legal dilakukan untuk mengurangi pajak terhutang. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan, serta memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Contoh dari pemanfaatan ini antara lain adanya biaya bunga yang timbul akibat pendanaan dengan hutang. Biaya bunga merupakan elemen pengurang dalam melakukan penghitungan beban pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar berkurang.

Penghindaran pajak merupakan sorotan pemerintah secara global, mengingat maraknya aktivitas ini di kalangan wajib pajak. Di Indonesia, kasus penghindaran pajak yang sudah ditangani oleh Direktorat Jendral Pajak antara lain kasus Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia. Melalui kasus ini, dapat dilihat tren bahwa tindakan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dengan aset yang besar. Aset perusahaan yang berjumlah besar cenderung menghasilkan laba yang besar sehingga menyebabkan pajak yang dibayar juga meningkat. Kemudian di tahun 2005 realisasi investasi yang berasal dari

perusahaan multinasional meningkat dari tahun sebelumnya, dimana kenaikannya diprediksi mencapai USD 8,68 miliar,. Namun, kondisi yang ada menunjukkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak tidak sebanding dengan peningkatan investasi yang terjadi (Maharani, 2015). Di luar negeri, perusahaan ternama juga turut terlibat kasus penghindaran pajak, seperti yang terjadi pada perusahaan Apple, Starbucks, dan HSBC.

Berbagai skema dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan multinasional. Skema yang dilakukan antara lain pemanfaatan *tax havens countries*. *Tax havens countries* adalah negara surga pajak, dimana negara yang tergolong dalam kategori ini memiliki tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak mengenakan tarif pajak di negaranya. Menurut OECD terdapat 33 negara yang masuk ke dalam kategori *tax havens countries*. Skema yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah mendirikan anak perusahaan di *tax havens countries*, kemudian memindahkan laba diperoleh anak perusahaan di negara bertarif pajak tinggi ke anak perusahaan di *tax havens countries*. Skema selanjutnya yang dilakukan adalah pemanfaatan *transfer pricing*. Darussalam (2008) dalam Clarissa (2012) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai suatu kegiatan untuk meminimalisir atau meningkatkan biaya dan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil pajak yang terutang. Tindakan ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli barang antar asosiasi perusahaan dimana asosiasi perusahaan berada dalam wilayah peraturan pajak yang berbeda. Kemudian melalui transaksi ini perusahaan dapat melakukan manipulasi atas penghasilan

dan biaya yang timbul, dimana melalui tindakan ini jumlah pajak yang timbul diharapkan dapat berkurang.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya, Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya agar wajib pajak tidak merasa terbebani, seperti menerapkan kebijakan *tax amnesty*, *tax holiday*, dan *investment tax credit*. Selain kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menerapkan penurunan tarif pajak badan dalam negeri yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa tarif pajak badan domestik dan bentuk penghasilan yang diperoleh secara konstan turun dari 28% menjadi 25%. Selain itu Wajib Pajak badan domestik yang berdiri dalam bentuk PT mendapatkan pengurangan tarif 5% lebih ringan dari tarif tertinggi yang ada, dimana hal ini ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1b UU PPh. Keringanan ini dapat diperoleh apabila perseroan yang terdaftar di BEI memiliki saham publik minimal 40% atau lebih dari jumlah total saham yang dimiliki, dan setidaknya ada 300 pihak yang memiliki saham tersebut. Kemudian pihak tersebut kepemilikannya dibatasi dengan jumlah tidak melebihi 5% dari total saham seluruhnya. Tidak hanya itu, dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, dimuat ketentuan bahwa usaha yang dimiliki wajib pajak apabila penjualannya tidak melebihi 4,8 milyar, setiap bulan penyeteroran pajaknya dapat dilakukan sendiri dimana pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan yang bersifat final yang berjumlah 1% dari omzet bulanan.

Berbagai hal dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, namun di mata perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus diminimalisir atau bahkan dihindari. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung dalam rangka melakukan kewajibannya (Mangoting, 1999). Selain itu perusahaan ingin laba yang diperoleh tidak berkurang karena disetor dalam bentuk pajak sehingga laba tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Desai dan Dharmapala (2006) menyebutkan bahwa keputusan penghindaran pajak dilakukan oleh manajer perusahaan. Menurut perspektif teori agensi, manajer (*agent*) diasumsikan memiliki informasi yang jauh melebihi informasi yang dimiliki pemilik perusahaan (*principal*). Kondisi ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Indonesia menerapkan metode *self assessment system*. Metode ini mengizinkan masyarakat dimana perhitungan dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri. Menurut perspektif teori agensi, dengan kelebihan informasi yang dimiliki, manajer dapat bersikap oportunistik dalam menentukan keputusan mengenai besar pajak yang dibayarkan tanpa melanggar aturan hukum. Menjadi masalah apabila tindakan ini dilakukan manajer untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, tanpa melihat kepentingan *principal* dan dampak jangka panjang terhadap perusahaan. Untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen ini, perlu dibentuk suatu tata kelola perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh penting mengenai kebijakan pajak perusahaan, karena manajemen pajak dapat menjadi kompleks serta adanya kesempatan untuk bersikap oportunistik dalam pengelolaannya. Selain itu terdapat ketidakpastian yang tinggi dan tidak ada dampak langsung yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam manajemen pajak yang menyebabkan perlunya pengetahuan mengenai fungsi tata kelola untuk dampak jangka panjang dan jangka pendek perusahaan.

Tata kelola perusahaan adalah isu yang mendapat perhatian secara istimewa di Indonesia setelah kejadian krisis moneter tahun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam rangka memperbaiki tata kelola perusahaan, sejak tahun 1999 Komite Nasional Kebijakan Governance telah dibentuk dimana mereka telah mengeluarkan panduan tata kelola perusahaan yang baik, dimana panduan ini mengalami perbaikan pada tahun selanjutnya. Penerapan tata kelola perusahaan ini diharapkan dapat mendorong adanya suatu perilaku profesional, transparan, efisien dan mengoptimalkan fungsi *top management* (Irawan dan Farahmita, 2012). Pengawasan terhadap manajemen juga dapat ditingkatkan untuk pengambilan keputusan dan mencegah perilaku oportunistik manajemen yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan serta mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

La Porta (2001) dalam Ying (2011) mengatakan bahwa struktur kepemilikan adalah isu yang umum dalam tata kelola perusahaan. Ying (2011) berargumen bahwa dampak dari struktur kepemilikan terhadap ETR belum

ditelusuri lebih jauh, khususnya di negara berkembang. Perusahaan yang terdaftar di BEI kepemilikan sahamnya didominasi oleh investor institusi, dimana persentase kepemilikannya mencapai 73,14 persen (CNN Indonesia, 2016). Angka ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan perusahaan di Indonesia akan didominasi oleh investor institusional, akibat besarnya kepemilikan saham yang mereka miliki. Kondisi ini dapat mendorong manajer perusahaan untuk tidak melakukan strategi pajak, seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak hanya mengejar keuntungan jangka pendek dimana hal ini dapat merugikan perusahaan, karena tidak memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, seperti masalah hukum dan reputasi perusahaan. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini akan diuji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, mengingat angka investor institusional yang cukup besar di perusahaan yang terdaftar di BEI. Perlu diketahui apakah mereka cukup efektif dalam mengawasi kinerja manajer perusahaan terutama dalam kebijakan perpajakan yang diambil.

Selain dari struktur kepemilikan, tindakan manajemen juga diawasi melalui dewan komisaris independen. Adanya dewan komisaris independen menyebabkan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dapat terjaga karena komisaris independen lebih objektif dan independen terhadap keputusan yang ditetapkan manajemen perusahaan (Laila, 2011).

Komite audit dibentuk agar meringankan tugas dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan secara internal dan pembuatan laporan keuangan. Komite audit memiliki peran penting dalam menyediakan komunikasi formal

antara pihak internal serta eksternal perusahaan. Sehingga dengan adanya keberadaan komite audit akurasi terhadap laporan keuangan dapat ditingkatkan serta kepercayaan pihak yang berkepentingan dapat terjaga. Komite audit harus memiliki paling sedikit satu orang yang memiliki latar belakang bidang keuangan. Hal ini penting karena melalui kemampuan ini efektifitas komite audit dapat ditingkatkan. Komite audit diketuai oleh dewan komisaris independen perusahaan.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan akan diserahkan kepada auditor eksternal yang ditunjuk komite audit untuk dilakukan verifikasi. Keberadaan auditor eksternal merupakan cerminan transparansi informasi suatu perusahaan. Melalui laporan keuangan yang diverifikasi oleh auditor eksternal, *shareholder* dan *stakeholder* akan mengetahui kinerja manajemen perusahaan yang sebenarnya termasuk jumlah pajak perusahaan. Pemegang saham cenderung menginginkan perusahaan untuk taat dalam melaksanakan kewajibannya termasuk wajib membayar pajak, karena hal ini menyangkut citra dan reputasi perusahaan di hadapan publik. Auditor eksternal yang memiliki reputasi yang baik dianggap lebih jujur dan independen terhadap kliennya, seperti Auditor yang masuk dalam kategori *Big Four*. Sehingga, dengan segala profesionalisme dan independensi yang dimiliki auditor eksternal dapat mencegah perusahaan untuk menghindari pajaknya.

Penelitian terkait penghindaran pajak dan *corporate governance* telah beberapa kali dilakukan dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sabli



dan Noor (2012) menyimpulkan tidak ada pengaruh presentase direktur independen dan investor institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Winata (2013) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai proksi *corporate governance* secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen serta ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana *tax avoidance* diukur menggunakan *book tax gap*.

Penelitian Annisa (2012) menyimpulkan investor institusional, KAP, serta independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan, sedangkan jumlah dewan komisaris dan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di lain pihak, Khairunissa (2014) menyimpulkan independensi dewan komisaris dan auditor eksternal berpengaruh signifikan, sementara kepemilikan institusional, komite audit, dan jumlah dewan direksi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan tarif pajak efektif. Di lain pihak, Pohan (2008) menemukan pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini dirasa perlu diteliti kembali, karena tidak konsistennya hasil penelitian yang bisa disebabkan karakter sampel penelitian yang berbeda dan metode pengukuran penghindaran pajak. Penelitian ini juga menyesuaikan dengan struktur tata kelola perusahaan di Indonesia, dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional, jumlah komite audit, latar belakang

keuangan komite audit, presentasi dewan komisaris independen, dan kualitas audit untuk mengukur tata kelola perusahaan.

Ada beberapa metode untuk mengukur penghindaran pajak, namun penelitian ini akan mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan *GAAP ETR* karena pengukuran ini mengikutsertakan pajak tanggungan sehingga memuat beban pajak yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan dan menggunakan sampel industri manufaktur dari tahun 2012-2014. Sampel industri manufaktur dipilih karena industri ini memiliki skala besar dan terdiri dari banyak subsektor, sehingga industri manufaktur bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dalam pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Dewan Komisaris Independen dengan penghindaran Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran Komite Audit dengan penghindaran pajak?

4. Apakah terdapat pengaruh antara Latar belakang keahlian keuangan komite audit dengan penghindaran pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh antara Kantor Akuntan Publik dengan penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Latar Belakang Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Kantor Akuntan Publik terhadap penghindaran pajak.

Kegunaan penelitian ini berdasarkan tujuan di atas adalah:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya otoritas pajak mampu mendeteksi dan menanggulangi tindakan penghindaran pajak dengan membuat peraturan perpajakan yang lebih kompleks lagi.

## 2. Bagi Perusahaan

Mampu menciptakan laporan keuangan yang memiliki kualitas audit baik, dan membantu manajemen perusahaan dalam keputusan pendanaan dan meningkatkan performa perusahaan, serta dapat melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

## 3. Bagi Masyarakat

Memberikan penilaian dan pandangan mengenai perusahaan kepada masyarakat yang dapat berguna untuk kegiatan jangka panjang ke depannya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II           TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan hasil penelitian yang relevan yang melandasi penelitian ini yang dituangkan dalam kerangka pemikiran dan penyusunan hipotesis.

#### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan variabel dan definisi operasionalnya populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan analisis penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis serta pengujian hipotesis serta pembahasan.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan keterbatasan serta saran untuk penelitian yang akan datang.